

Lombok Barat Index Transparansi Infrastruktur (ITI)

Presentasi Hasil 2024



INTRAS



UK Government



Infrastructure
Transparency
Initiative

West Lombok, Indonesia

www.infrastructuretransparency.org

This initiative is supported by UK Government, ASEAN Economic Reform Programme through the UNDP Project "Promoting a Fair Business Environment in ASEAN"

Content

1. Pengenalan
2. Metodologi
3. Hasil
4. Kesimpulan
5. Lampiran



1. Pengenalan(Introduction)

Indeks Transparansi Infrastruktur (ITI) adalah instrumen CoST yang mengukur tingkat transparansi dan kualitas proses terkait infrastruktur publik di tingkat nasional atau daerah. Dirancang secara kolaboratif dan berdasarkan praktik baik dan pembelajaran internasional, dengan tujuan menyediakan informasi berkualitas yang berfungsi untuk mendorong transparansi dan meningkatkan pengelolaan infrastruktur publik.

Transparansi untuk infrastruktur publik yang lebih efektif, inklusif dan berkelanjutan.

Dimensions

Lingkungan yang mendukung
(Enabling environment)



Kapasitas dan Proses
(Capabilities and processes)

Partisipasi Masyarakat
(Citizen participation)



Keterbukaan Informasi
(Information disclosure)

Dimensions

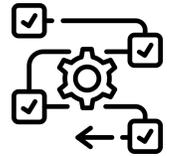
Lingkungan yang mendukung

- Kerangka peraturan akses terhadap informasi publik
- Standar transparansi dalam infrastruktur publik
- Alat informasi digital nasional



Kapasitas dan proses

- Pengetahuan transparansi dasar
- Kapasitas digital
- Prosedur untuk mengungkapkan informasi
- Faktor pendukung dan hambatan untuk mengungkapkan informasi
- Kontrol atas keterbukaan proyek infrastruktur



Partisipasi masyarakat

- Peluang partisipasi
- Penggunaan informasi oleh warga negara

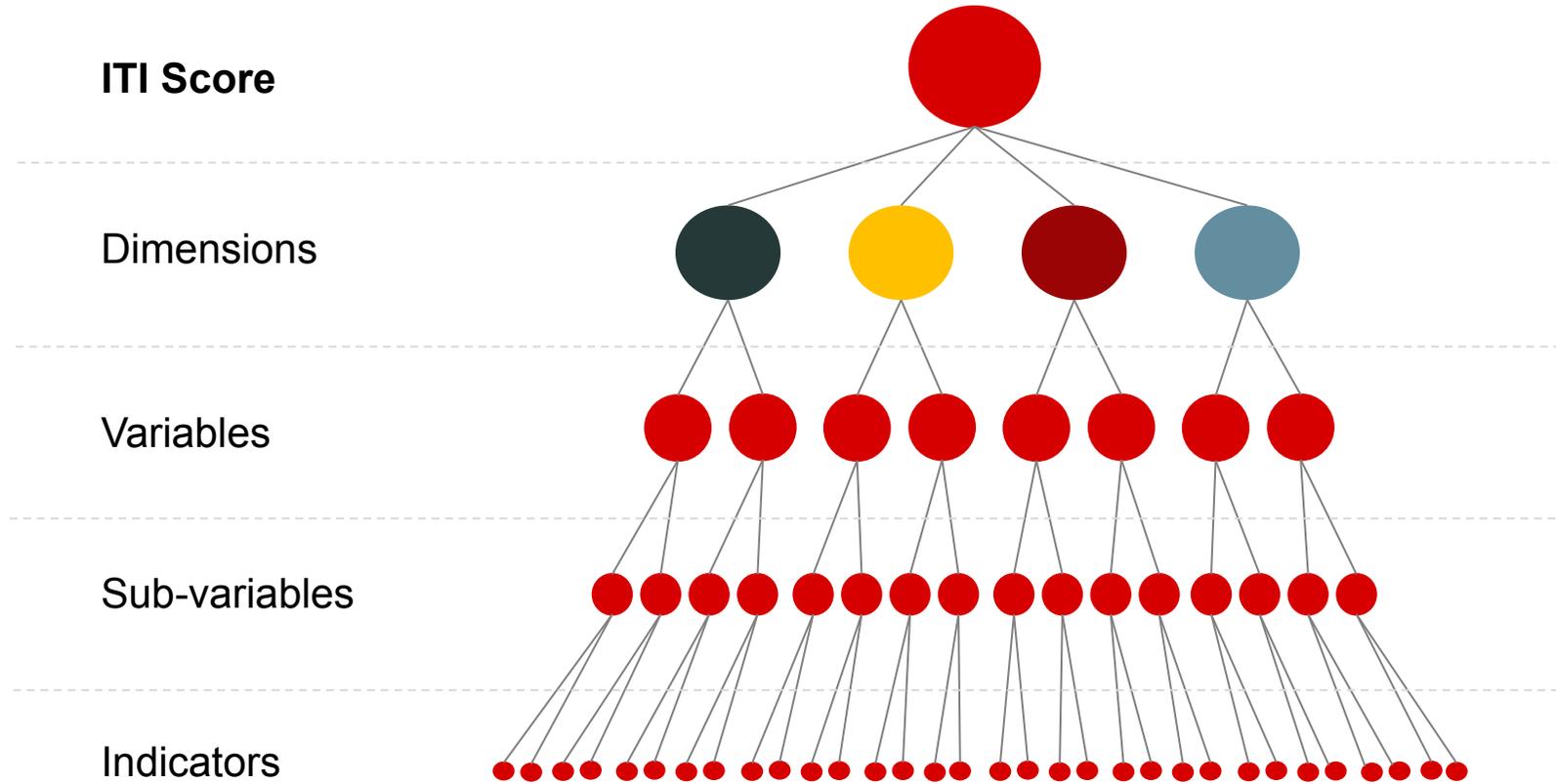


Keterbukaan informasi

- Identifikasi proyek
- Persiapan proyek
- Pengadaan kontrak pelaksanaan dan pengawasan
- Eksekusi dan pengawasan pelaksanaan kontrak



Structure



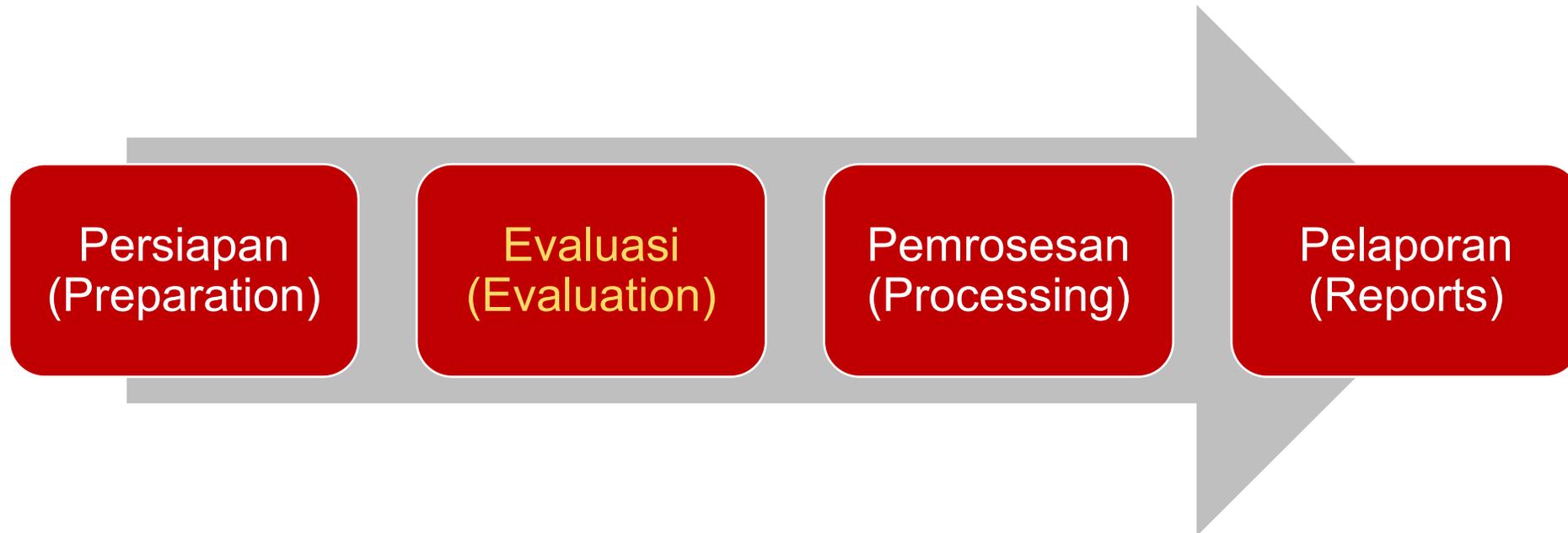
Keluaran dan hasil

ITI menawarkan skor transparansi untuk serangkaian indikator komprehensif berdasarkan skala 100 poin yang berkontribusi pada:

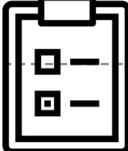
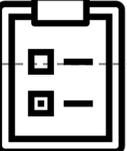
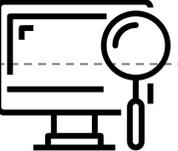
- Meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan kelemahan transparansi dalam infrastruktur publik.
- Memandu para pemimpin publik, pada tingkat terpusat dan desentralisasi, untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas di sektor ini.
- Mengembangkan agenda kolaboratif untuk meningkatkan standar transparansi yang berkontribusi pada infrastruktur yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

2. Metodologi

Proses implementasi



Evaluasi Metode pengumpulan data

| | Lingkungan yang mendukung | Kapasitas dan proses | Partisipasi masyarakat | Keterbukaan informasi |
|-----------------------|--|--|--|--|
| Objek yang dievaluasi | Kondisi nasional dan atau subnasional | Entitas pengadaan | Entitas pengadaan | Proyek entitas pengadaan |
| Metode pengumpulan | Penelitian desktop (dokumen & komputer)  | Survey instansi  | Survey instansi  | Penelitian desktop (dokumen & komputer)  |

Evaluasi

Sample entitas pengadaan

Proses:

1. Mendata semua pekerjaan proyek dalam periode tahun 2016-2022
2. Mengumpulkan data proyek per masing-masing Dinas
3. Mengurutkan berdasarkan nilai proyek tertinggi sampai dengan terendah pada masing-masing Dinas
4. Pengambilan dua proyek dengan proyek yang memiliki nilai kontrak tertinggi dan satu proyek acak.
5. Melakukan evaluasi sesuai form

| No. | Nama Instansi |
|-----|--|
| 1. | Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat |
| 2. | Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat |
| 3. | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat |
| 4. | Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat |
| 5. | Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat |
| 6. | Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat |
| 7. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Barat |
| 8. | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat |
| 9. | Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat |
| 10. | Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat |
| 11. | Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat |
| 12. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Cipta Karya |
| 13. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat |
| 14. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Bina Marga |
| 15. | Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kabupaten Lombok Barat |
| 16. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sumber Daya Air |
| 17. | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Lombok Barat |

SEKTOR

Transportasi
Kesehatan
Perdagangan
Pertanian
Pendidikan
Pariwisata
Pengairan

- 14 Entitas merupakan instansi yang mengadakan proyek infrastruktur publik di periode antara 2016-2022
- 3 Entitas merupakan Bidang dari instansi Dinas Pekerjaan Umum

Evaluasi

Sample proyek

Langkah 1: Pengumpulan Data - Data proyek infrastruktur dari beberapa sumber termasuk BUMD yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Data ini mencakup detail proyek, seperti nama, jenis, sektor, anggaran, tahun pelaksanaan, dan sumber anggaran.

Langkah 2: Klasifikasi Proyek - Proyek-proyek diklasifikasikan berdasarkan sektor (misalnya, jalan, gedung, SPAM, jaringan irigasi, dan lain sebagainya) dan jumlah anggaran proyek.

Langkah 3: Seleksi Proyek - Dua proyek yang berbeda dipilih dari masing-masing kelompok sektor dan ukuran anggaran. Seleksi pertama dilakukan untuk nilai proyek tertinggi, selanjutnya pemilihan dilakukan secara acak, dan proyek-proyek yang telah dievaluasi lebih awal tidak dipilih lagi.

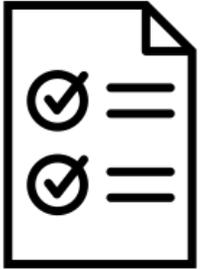
| No. | Nama Proyek | Anggaran Proyek | Entitas Pengadaan |
|-----|--|----------------------|-------------------------------------|
| 1 | Pembangunan Dermaga Rakyat Tembowong | Rp. 8.841.187.000,00 | Dinas Perhubungan |
| 2. | Rehabilitasi Jalan Lingkungan dan Areal Parkir (Fasilitas Darat) Pelabuhan Tawun | Rp. 1.947.793.000,00 | Dinas Perhubungan |
| 3. | Pembangunan Pasar Gunungsari 4 | Rp. 5.757.950.000,00 | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| 4. | Pembangunan Pasar Eyat Mayang, Lembar | Rp. 1.414.203.500,00 | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| 5. | Revitalisasi SMPN 1 Sekotong | Rp. 3.620.981.579,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 6. | Rehab Ruang Kelas SDN 1 Gelangsar | Rp. 754.620.000,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 7. | Renovasi Taman Giri Menang Square (GMS) Gerung Tender Ulang | Rp. 7.278.000.000,00 | Dinas Perumahan Dan Pemukiman |
| 8. | Penataan Lampu Kawasan Giri Menang Square (GMS) Tender Ulang | Rp. 889.105.000,00 | Dinas Perumahan Dan Pemukiman |
| 9. | Pembangunan Gedung HCU (DAK) | Rp. 8.750.000.000,00 | Rumah Sakit Umum Daerah |
| 10. | Pembangunan Power House | Rp. 563.543.170,00 | Rumah Sakit Umum Daerah |
| 11. | Pembangunan Puskemas Banyumulek (DAK AFIRMASI) | Rp. 9.570.524.806,00 | Dinas Kesehatan |
| 12. | Pembangunan Rumah Genset (PINJAMAN DAERAH) RSUD Awet Muda Narmada | Rp. 814.170.000,00 | Dinas Kesehatan |
| 13. | Pelaksanaan Penataan Kawasan Taman Lingsar | Rp. 4.000.000.000,00 | Dinas Pariwisata |
| 14. | Lampu Taman Tenaga Surya (DAK) | Rp. 280.500.000,00 | Dinas Pariwisata |
| 15. | Pengadaan Rumah Kompos kapasitas 1 ton/hari | Rp. 840.000.000,00 | Dinas Lingkungan Hidup |

| | | | |
|-----|--|----------------------|---|
| 16. | Pembangunan Prasarana Perkantoran BPP Kecamatan Narmada | Rp. 500.160.700,00 | Dinas Pertanian |
| 17. | Perbaikan RPH Ruminansia Kec. Lingsar (DAK) | Rp. 332.500.000,00 | Dinas Pertanian |
| 18. | Integrasi Pergaraman | Rp. 328.633.000,00 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 19. | Rekonsiliasi/Integrasi Pegaraman di Desa Buwun Mas | Rp. 900.000.000,00 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 20. | Pembangunan Lapak PKL TP 2019 KEMENTRIAN KOPERASI dan UKM RI | Rp. 455.000.000,00 | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah |
| 21. | Revitalisasi Pasar Rakyat yang di Kelola oleh Koperasi | Rp. 864.500.000,00 | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah |
| 22. | Pembangunan Gedung Kantor BKP Gunungsari | Rp. 300.000.000,00 | Badan Pendapatan Daerah |
| 23. | Pembangunan Gedung Kantor BKP Kediri | Rp. 300.000.000,00 | Badan Pendapatan Daerah |
| 24. | Rehabilitasi Talud Sungai Eyat Mayang kec. Lembar | Rp. 394.000.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 25. | Rehabilitasi Jembatan Kelep Desa Taman Sari Kecamatan Sekotong | Rp. 2.000.000.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 26. | Pembangunan Lanjutan GOR Mini | Rp. 4.800.000.000,00 | Dinas Pemuda Dan Olahraga |
| 27. | Rehabilitasi / perbaikan prasarana irigasi (DAK Reg) Daerah Irigasi Pesongoran Kuripan | Rp. 500.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sumber Daya Air |
| 28. | Rehabilitasi Saluran Sekunder DI.Keru (DAK Penugasan) | Rp. 6.458.579.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sumber Daya Air |
| 29. | Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (057) Keru-Suranadi | Rp.19.368.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Bina Marga |
| 30. | Paket I (satu) Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten (DAK Reguler Bidang Jalan) (003) Pelangan - Labuan Poh | Rp.10.160.616.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Bina Marga |
| 31. | Pembangunan Konstruksi Gedung IGD RSUD Patut Patuh Patju (Pinjaman Daerah) | Rp.80.000.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Cipta Karya |
| 32. | Rehabilitasi Gedung Kantor PEMDA dampak Bencana | Rp.1.492.000.000,00 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Cipta Karya |

Evaluasi

Protokol interaksi entitas

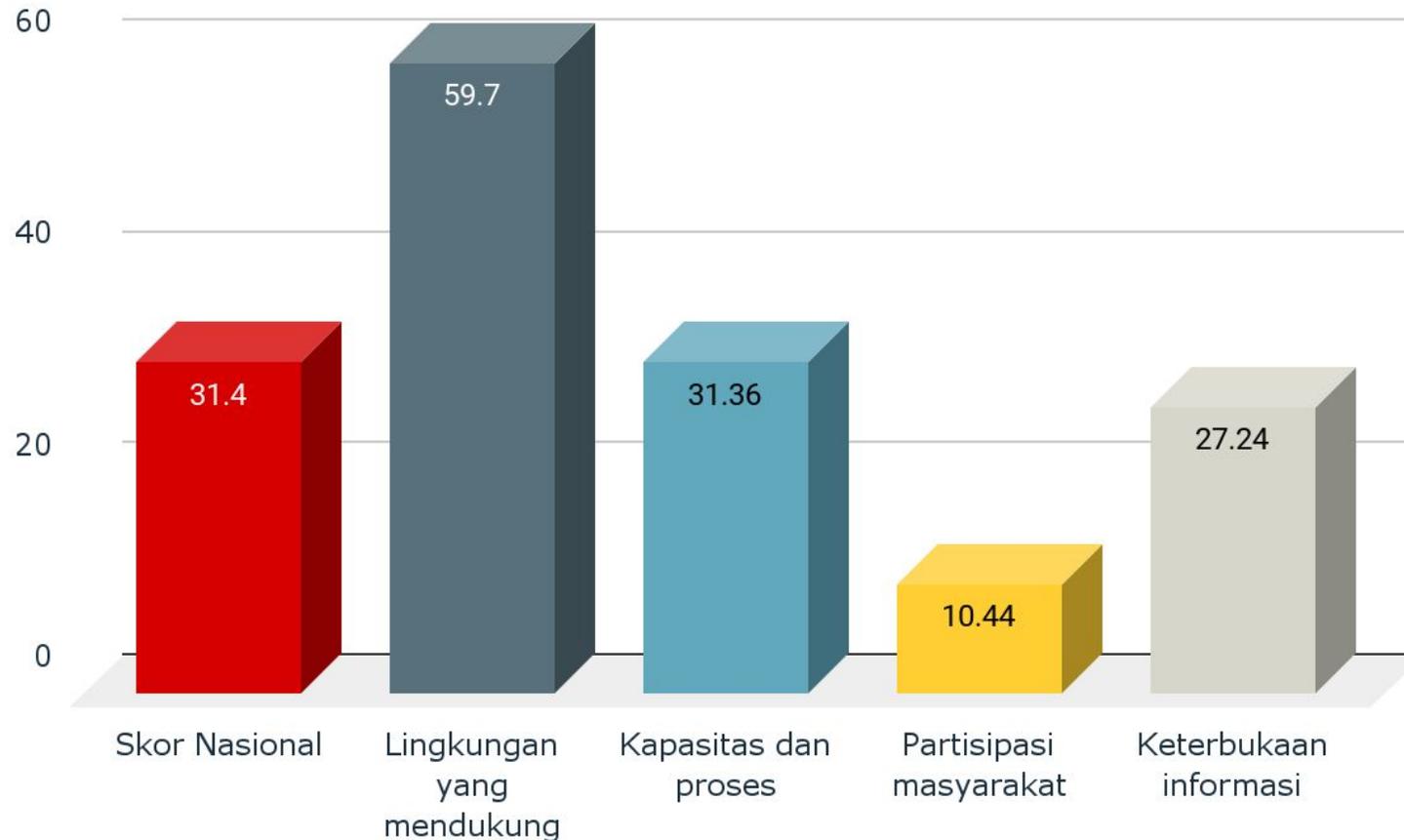
1. Dalam proses evaluasi, interaksi dengan EP dimulai dengan mengirimkan undangan resmi untuk berpartisipasi dalam survei ITI. Survei ini mencakup dimensi-dimensi yang dievaluasi dan pertanyaan terkait transparansi proyek.
2. Proses berlanjut dengan pengiriman pengingat kepada EP yang belum merespons undangan setelah periode waktu 1 (satu) minggu setelah diberikan survey.
3. Jika EP merespons undangan, mereka diberikan form survei dan diminta untuk mengisi survei sesuai dengan panduan yang disediakan dalam batas waktu 1 (satu) minggu.
4. Jika EP mengalami penundaan atau tidak merespons dalam batas waktu yang ditentukan, proses selanjutnya adalah dengan mengirimkan surat pengingat dan upaya komunikasi lanjutan untuk memfasilitasi partisipasi.



Seluruh entitas pengadaan mengisi survey

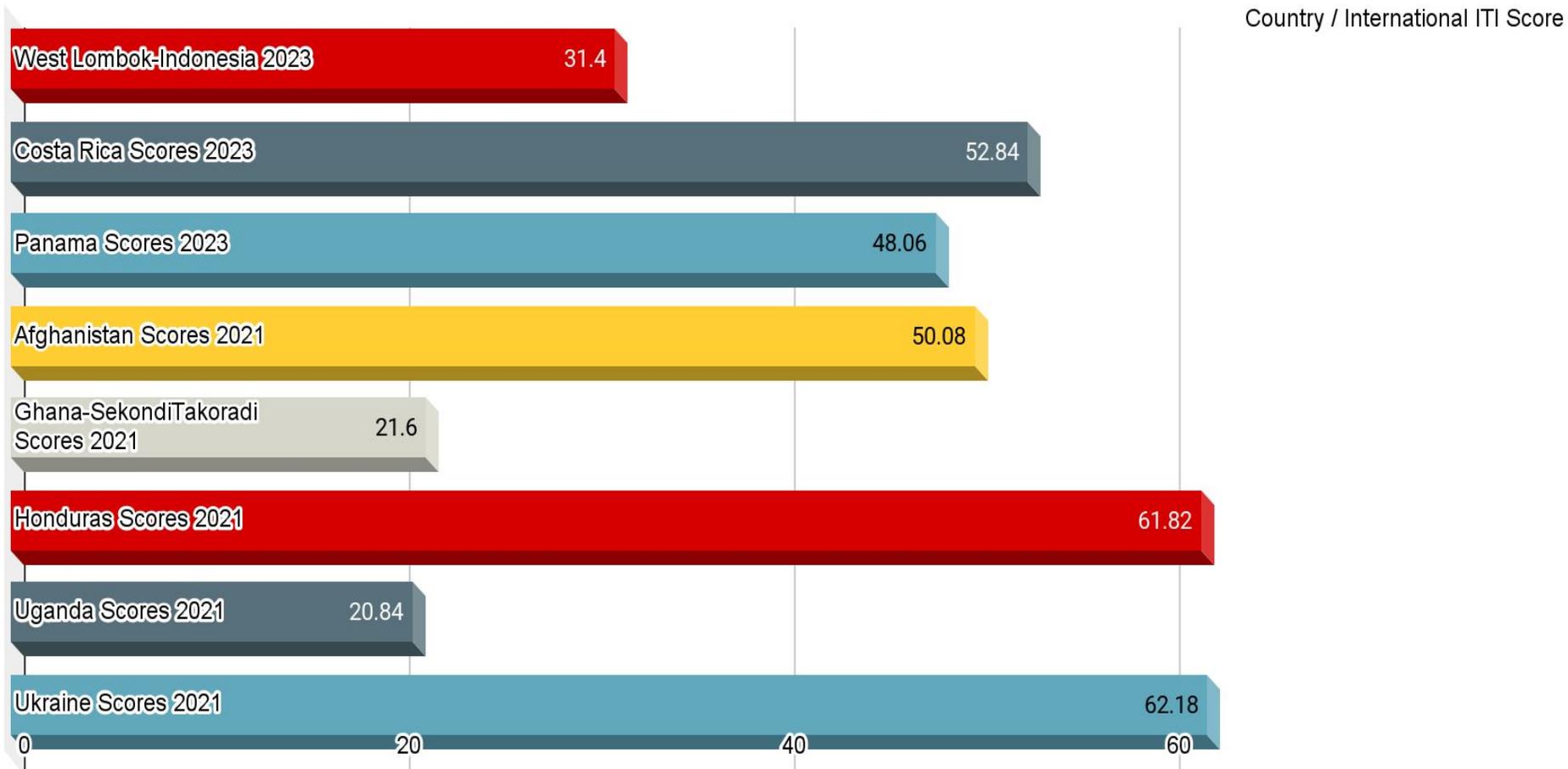
3. Hasil

Skor ITI Kabupaten Lombok Barat



- perlu adanya perbaikan hampir di seluruh dimensi keterbukaan data
- Skor tertinggi pada Lingkungan yang mendukung
- Skor terendah pada partisipasi masyarakat
- belum adanya staff khusus informasi
- keterbukaan data publik yang masih terbatas hanya di tahap tender saja

Perbandingan internasional: ITI Kabupaten Lombok Barat



- skor ITI Lombok Barat berada diatas beberapa program CoST
- cenderung berada dibawah keseluruhan program CoST.

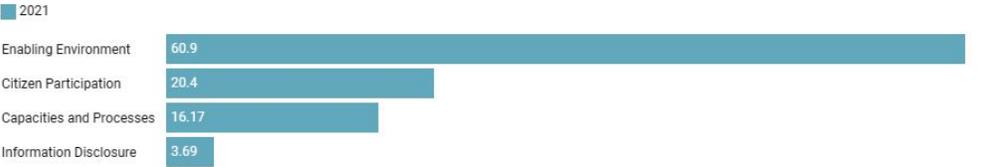
Perbandingan internasional: ITI Kabupaten Lombok Barat Cont.



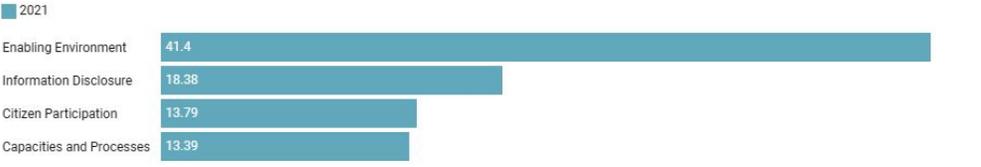
Afghanistan National ITI scores



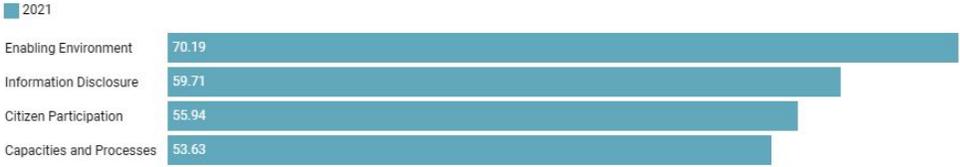
Costa Rica National ITI scores



Ghana: ITI Sub-national Score



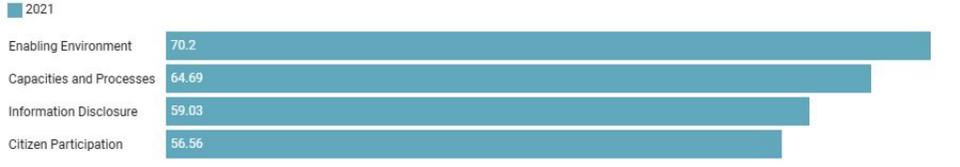
Uganda National ITI Scores



Honduras ITI National Score



National ITI scores (2023): Panama

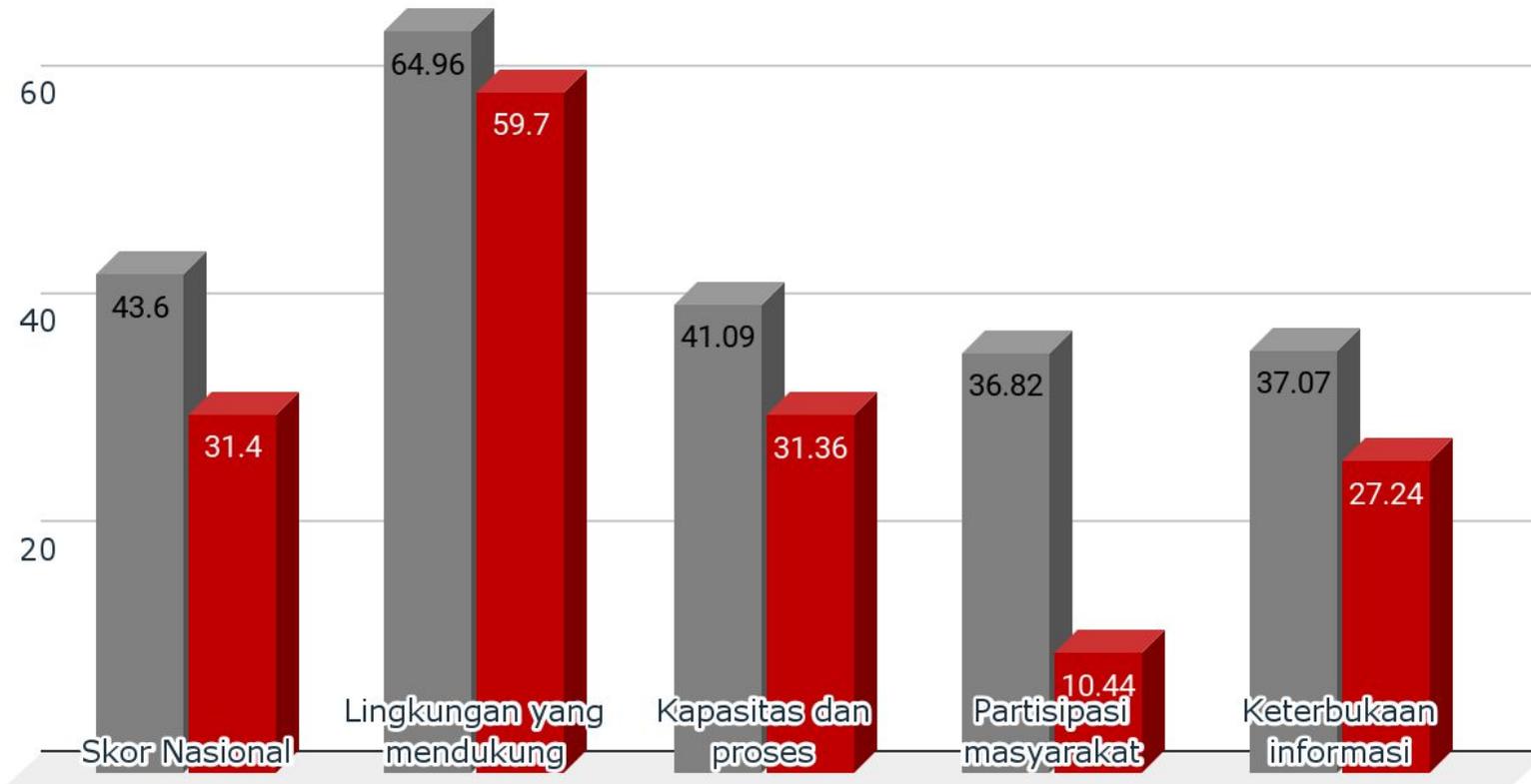


Ukraine National ITI Scores

- Trend skor hampir sama
- Nilai tinggi pada lingkungan yang mendukung
- Dimensi lainnya terlihat kurang

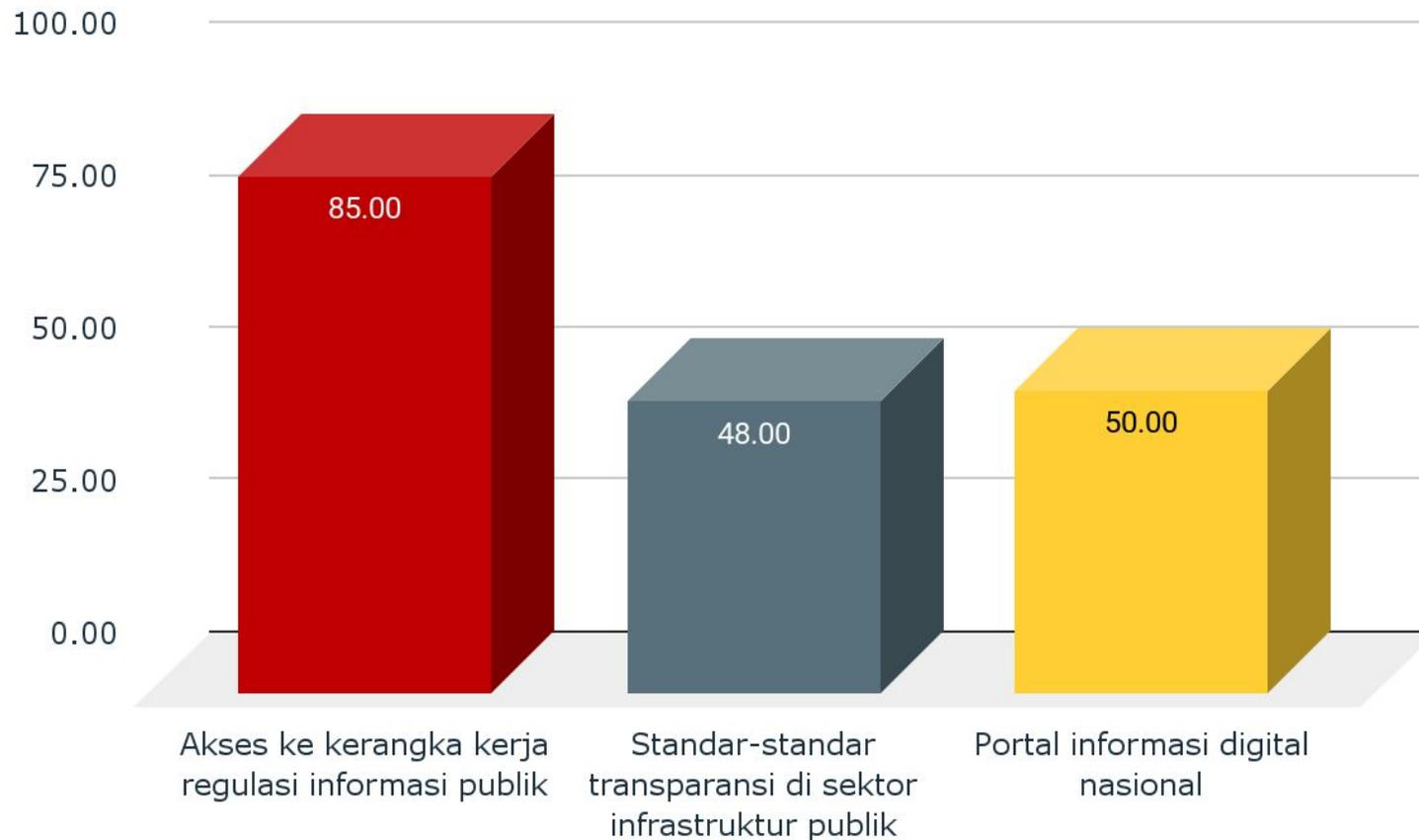
Perbandingan internasional: Dimensi ITI

■ Skor rata-rata global ■ Skor Lombok Barat



- Semua dimensi berada di bawah rata-rata internasional
- Selisih nilai rata-rata 12,2
- Dimensi 1,2 dan 4 terputus kecil dengan selisih 5-10 poin
- Partisipasi masyarakat terputus jauh dengan selisih 26,4 poin

Lingkungan yang mendukung



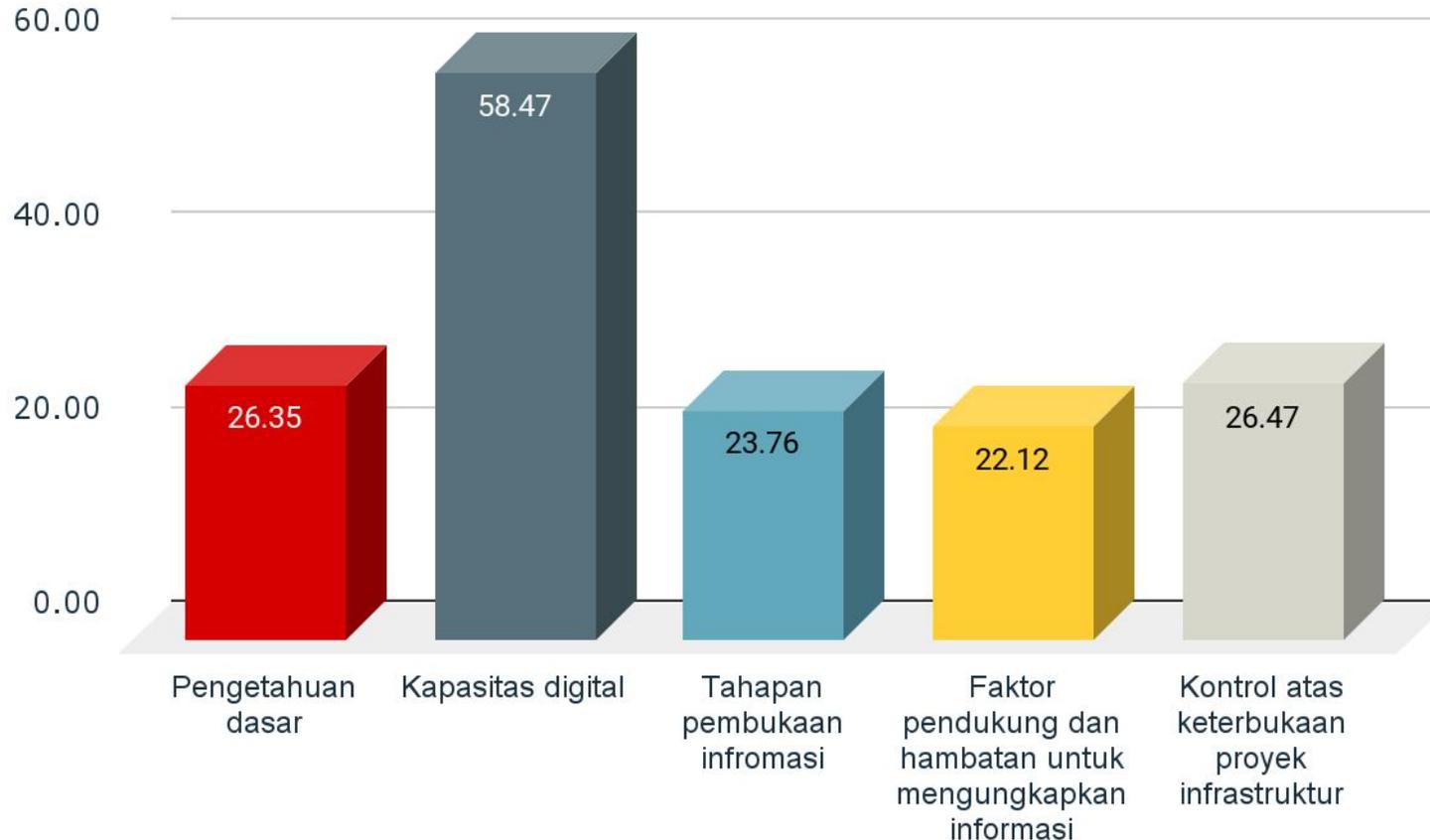
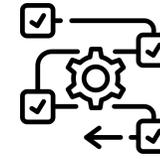
Indikator dengan nilai tertinggi

- Akses ke kerangka kerja regulasi informasi publik
- Sanksi atas ketidapatuhan terhadap mandat akses informasi publik
- Kemudahan akses informasi dalam platform informasi digital

Indikator dengan nilai terendah

- Sistem informasi geografis (GIS) proyek infrastruktur
- Standar keterbukaan data infrastruktur
- Proactive publication of information on public infrastructure projects

Kapasitas dan proses



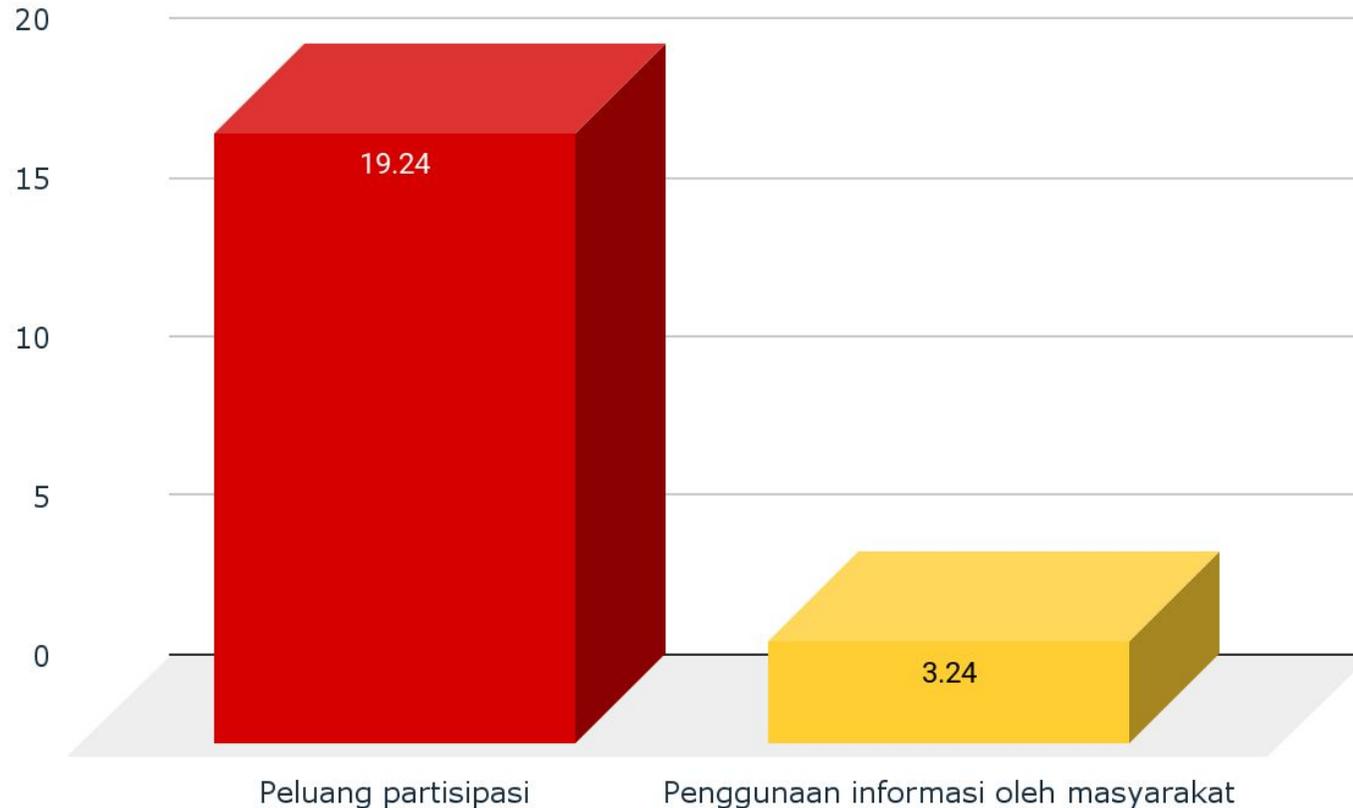
Indikator dengan nilai tertinggi

- Perangkat komputer
- Konektivitas ke internet
- Situs web instansi

Indikator dengan nilai terendah

- Visualisasi berdasarkan data proyek infrastruktur
- Rencanakan untuk mengurangi keterbatasan dalam mempublikasikan informasi
- Hambatan birokrasi untuk mempublikasikan informasi

Partisipasi masyarakat



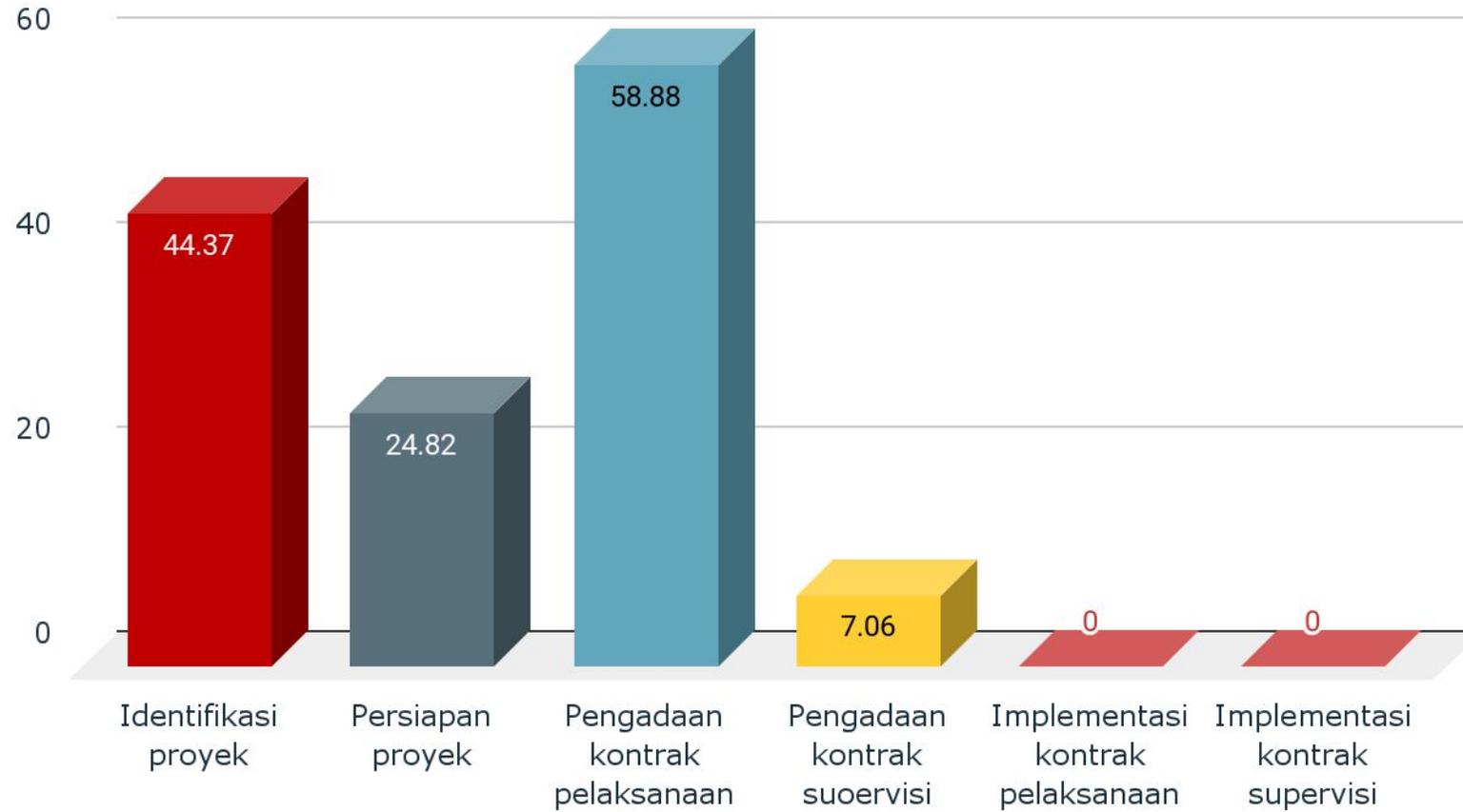
Indikator dengan nilai tertinggi

- Partisipasi warga negara yang terlembaga
- Partisipasi masyarakat dalam proyek infrastruktur
- Kesadaran akan peluang partisipasi

Indikator dengan nilai terendah

- Bukti penggunaan institusional
- Warga menggunakan bukti
- Perbaikan respons sebagai terhadap partisipasi warga

Keterbukaan informasi



Indikator dengan nilai tertinggi

- Pemilik proyek
- Sumber pendanaan
- Jumlah perusahaan yang menawar

Indikator dengan nilai terendah

- Sektor dan subsektor
- Durasi kontrak
- Lingkup pekerjaan kontrak

Keterbukaan informasi Cont. Indikator dengan nilai 0

1. Tujuan
2. Dampak lingkungan
3. Dampak lahan dan pemukiman
4. Detail kontak
5. Judul resmi kontrak
6. Semua indikator pada data supervisi proyek infrastruktur kecuali proses pengadaan dan jumlah perusahaan yang ikut dalam tender.
7. Semua indikator dalam tahap pelaksanaan dari kontrak konstruksi proyek infrastruktur.

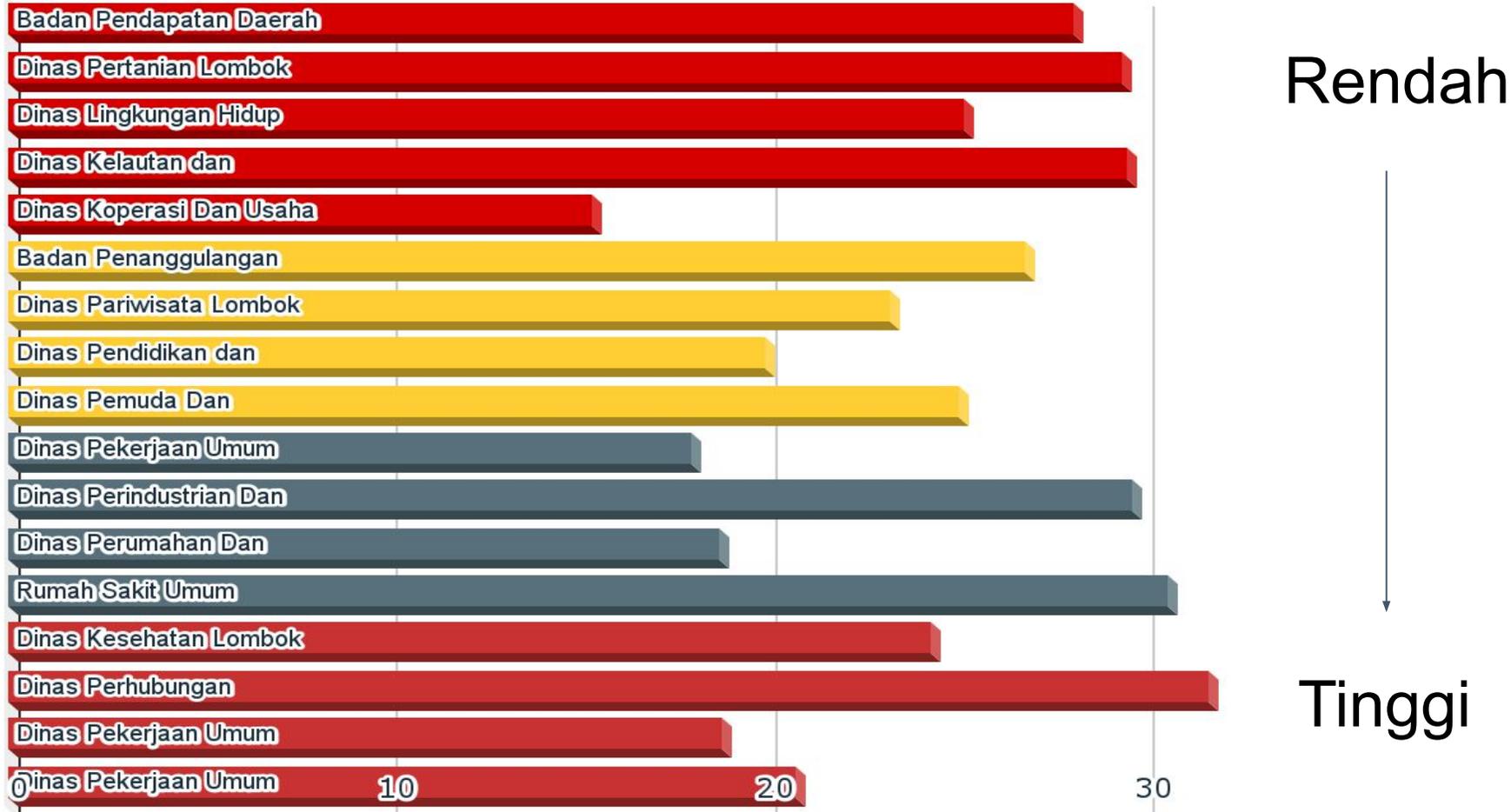


3.1 Hasil masing-masing entitas pengadaan

Entitas Pengadaan ITI: Top 10

| Ranking | Entity name | ITI Score | Capabilities and processes | Citizen participation | Information disclosure |
|-------------------------------|--|-----------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 | Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat | 31.71 | 38.22 | 14.35 | 23.8 |
| 2 | Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat | 30.62 | 51.79 | 25.8 | 25.6 |
| 3 | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat | 29.73 | 43.6 | 0 | 23.8 |
| 4 | Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat | 29.54 | 45.39 | 5.4 | 27.95 |
| 5 | Dinas Pertanian Lombok Barat | 29.45 | 38.68 | 15.9 | 30.8 |
| 6 | Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat | 28.18 | 30.15 | 5.1 | 27.95 |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) | 26.89 | 44.89 | 14.35 | 27.95 |
| 8 | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat | 25.28 | 32.84 | 25.8 | 31.1 |
| 9 | Dinas Pemuda Dan Olahraga | 25.11 | 28.45 | 0 | 27.95 |
| 10 | Dinas Kesehatan Lombok Barat | 24.41 | 32.26 | 5.4 | 29.6 |
| Rata-rata keseluruhan entitas | | 24.48 | 33.03 | 22.68 | 54.14 |

Entitas Pengadaan ITI: Perbandingan berdasarkan total anggaran proyek



- belum terlihat adanya keterkaitan khusus dengan skor ITI dari masing-masing Entitas Pengadaan

Entitas Pengadaan ITI: Top 5 proyek

| Peringkat | Entitas Pengadaan | Nama Proyek | Skor ITI |
|-----------|---|--|----------|
| 1 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Bina Marga | Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan (057) Keru | 32.9 |
| 2 | Dinas Kesehatan Lombok Barat | Pembangunan Rumah Genset (PINJAMAN DAERAH) RSUD Awet Muda Narmada | 31.1 |
| 2 | Dinas Pariwisata Lombok Barat | Pelaksanaan Penataan Kawasan Taman Lingsar | 31.1 |
| 2 | Dinas Pariwisata Lombok Barat | Lampu Taman Tenaga Surya (DAK) | 31.1 |
| 2 | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat | Pengadaan Rumah Kompos kapasitas 1 ton/hari | 31.1 |
| 2 | Dinas Pertanian Lombok Barat | Pembangunan Prasarana Perkantoran BPP Kecamatan Narmada | 31.1 |
| 3 | Dinas Pertanian Lombok Barat | Perbaikan RPH Ruminansia Kec. Lingsar (DAK) | 30.5 |
| 4 | Dinas Kesehatan Lombok Barat | Pembangunan Puskesmas Banyumulek (DAK AFIRMASI) | 28.1 |
| 5 | Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat | Integrasi Pergaraman | 27.95 |
| 5 | Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat | Rekonsiliasi/Integrasi Pegaraman di Desa Buwun Mas | 27.95 |
| 5 | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah | Pembangunan Lapak PKL TP 2019 KEMENTERIAN KOPERASI dan UKM RI | 27.95 |
| 5 | Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah | Revitalisasi Pasar Rakyat yang di Kelola oleh Koperasi | 27.95 |
| 5 | Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat | Pembangunan Gedung Kantor BKP Gunungsari | 27.95 |
| 5 | Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat | Pembangunan Gedung Kantor BKP Kediri | 27.95 |
| 5 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) | Rehabilitasi Talud Sungai Eyat Mayang kec. Lembar | 27.95 |
| 5 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) | Rehabilitasi Jembatan Kelep Desa Taman Sari Kecamatan Sekotong | 27.95 |
| 5 | Dinas Pemuda Dan Olahraga | Pembangunan Lanjutan GOR Mini | 27.95 |
| 5 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sumber Daya Air | Rehabilitasi / perbaikan prasarana irigasi (DAK Reg) Daerah Irigasi Pesongoran Kuripan | 27.95 |
| 5 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sumber Daya Air | Rehabilitasi Saluran Sekunder DI.Keru (DAK Penugasan) | 27.95 |

4. Kesimpulan

Kesimpulan

1. Skor ITI Lombok Barat adalah 31.4 dari nilai maksimal 100, nilai ini masih dibawah rata-rata internasional anggota CoST yaitu 43.6. Dibutuhkan tambahan skor 12.2 untuk berada di rata-rata internasional.
2. Skor dimensi 1 (Lingkungan yang mendukung) merupakan skor tertinggi untuk nilai ITI Lombok Barat di angka 59.7. Skor masih dibawah rata-rata internasional anggota CoST lainnya yaitu 64.9. Dimensi 1 memiliki gap terendah dari dimensi lainnya yaitu sebesar 5.2.
3. Skor dimensi 2 (Kapasitas dan proses) merupakan skor tertinggi kedua dengan nilai 31.36. Skor masih di bawah rata-rata internasional anggota CoST lainnya yaitu 41. Dimensi 2 memiliki gap sebesar 9.64 dari rata-rata internasional.
4. Skor dimensi 3 (Partisipasi masyarakat) merupakan skor terendah dengan nilai 10.44. Skor masih di bawah rata-rata internasional anggota CoST lainnya yaitu 36.83. Dimensi 3 memiliki gap tertinggi yaitu sebesar 26.38 dari skor rata-rata internasional.
5. Skor dimensi 4 (Keterbukaan informasi) berada di skor 27.24. Skor masih di bawah rata-rata internasional anggota CoST lainnya yaitu 37.06. Dimensi 45 memiliki gap 9.82 dari skor rata-rata internasional.
6. Tidak ada entitas yang memiliki staff informasi resmi yang khusus menangani hal-hal terkait permintaan informasi maupun keterbukaan informasi.
7. Portal keterbukaan data infrastruktur yang dapat diakses oleh publik yaitu Ipse (<http://www.lipse.lombokbaratkab.go.id/eproc4/>) yang merupakan portal untuk tahap tender pengadaan barang dan jasa. Portal ini tidak memberikan informasi tentang tahapan proyek lain yang relevan, seperti persiapan dan pelaksanaan.
8. Tidak ditemukan portal keterbukaan data yang resmi terkait siklus proyek lainnya setelah proses tender.
9. Tidak ditemukan adanya keterbukaan data untuk supervisi proyek infrastruktur.

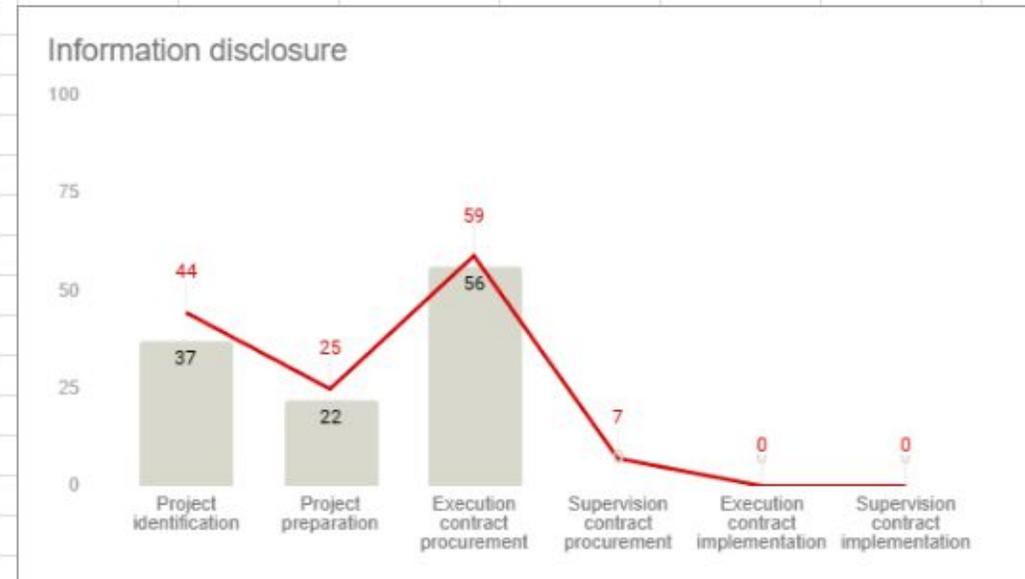
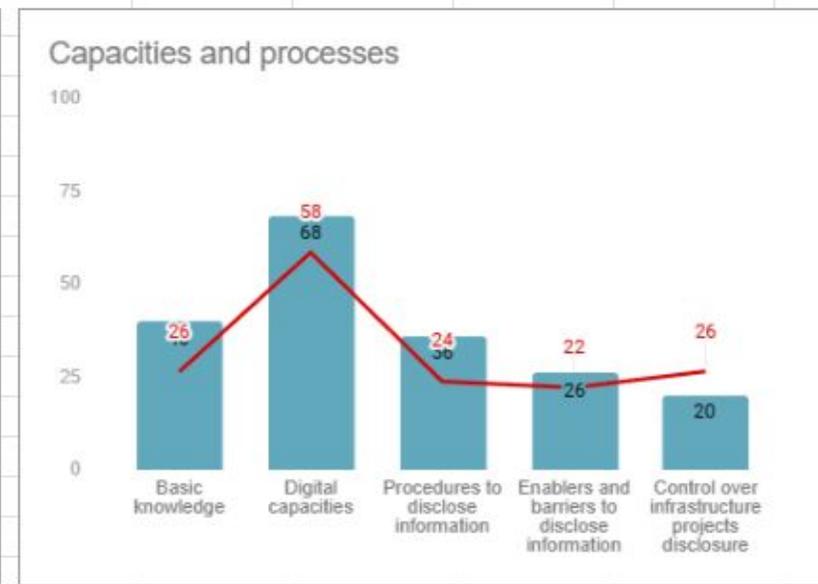
Rekomendasi

1. Perlu adanya staff informasi dalam setiap entitas pengadaan atau terpusat yang menangani hal-hal terkait permintaan informasi dan keterbukaan data infrastruktur di Kabupaten Lombok Barat. Hal ini dapat dilakukan dengan menunjuk satu staff dari masing-masing-PE untuk secara resmi menjadi staff informasi dan tertuang dalam suatu regulasi.
2. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan pengetahuan untuk staff informasi terutama terkait standar data serta sanksi dalam pelanggaran undang-undang keterbukaan data. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan kepada staff informasi yang ditunjuk oleh masing-masing EP.
3. Konsultasi publik perlu diadakan untuk semua proyek infrastruktur dan mengikutsertakan staff informasi agar dapat terdokumentasi dengan baik.
4. Staff informasi yang ditunjuk wajib mengikuti Musrenbang dan mendokumentasikan hal-hal penting dalam kegiatan partisipasi publik lainnya.
5. Perlu adanya portal keterbukaan informasi infrastruktur yang diperuntukkan untuk masyarakat agar mendapatkan informasi yang mudah, cepat, dan gratis dalam semua siklus pengadaan infrastruktur publik, berdasarkan standar CoST IDS atau OC4IDS.
6. Staff informasi perlu melakukan perbaruan data berkala minimal tiga bulan sekali di portal keterbukaan data infrastruktur yang ada.
7. Perlu adanya studi identifikasi birokrasi yang ada di dalam proses keterbukaan informasi infrastruktur.
8. Perlu adanya sosialisasi terkait portal-portal keterbukaan data bagi masyarakat sipil dan pengamat transparansi infrastruktur maupun transparansi lainnya untuk membaca dan menggunakan informasi tersebut..
9. Perlu peningkatan keterbukaan data untuk semua siklus pengadaan proyek infrastruktur.
10. Perlu adanya keterbukaan data khusus untuk supervisi proyek infrastruktur.

5. Lampiran: Procuring entities dashboard

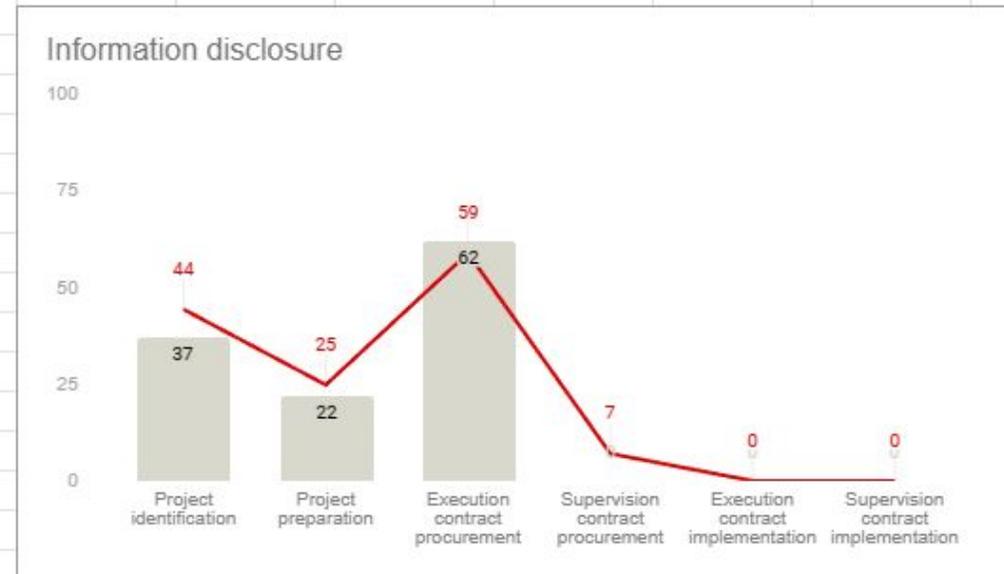
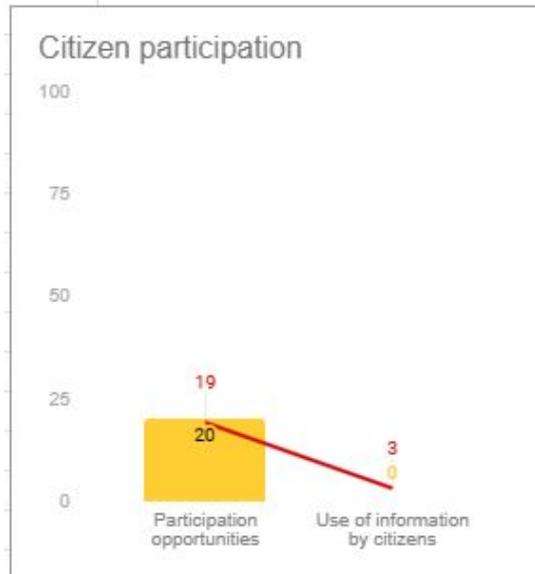
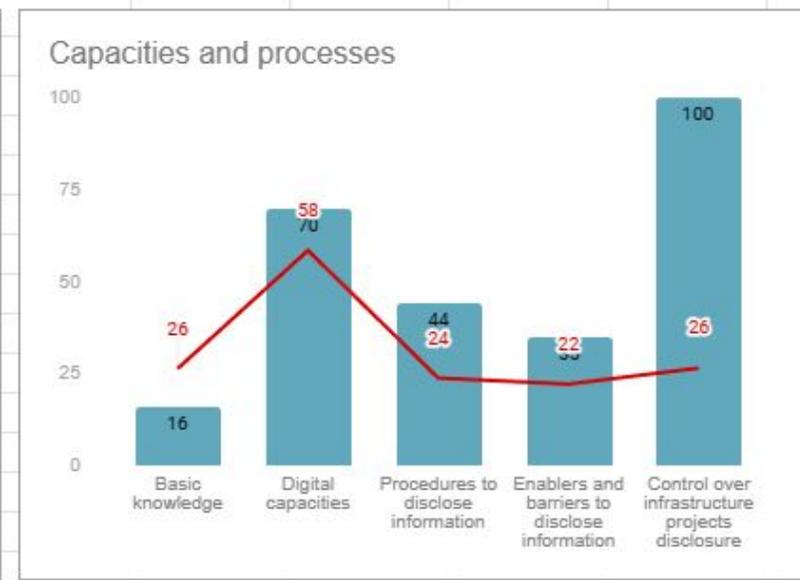
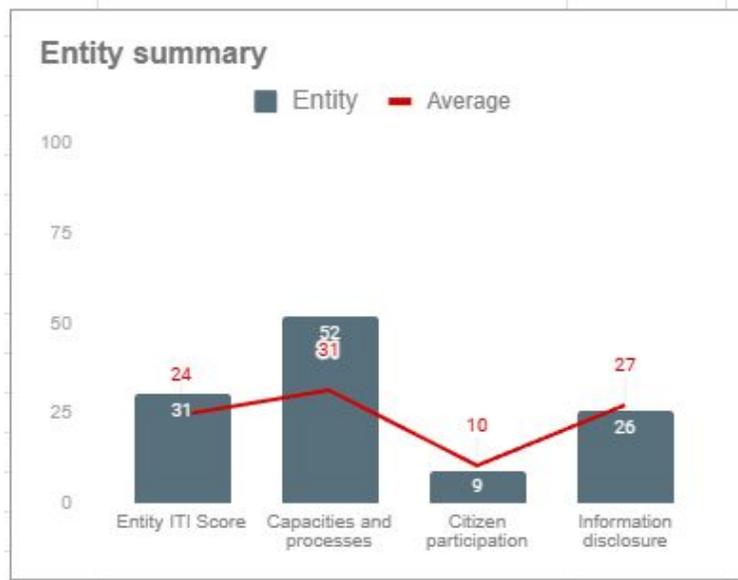
Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat

Posisi 1



Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat

Posisi 2



Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat

Posisi 3

